

MAHASISWA SEBAGAI PRESSURE GROUP : FENOMENA *SILENT MAJORITY* DI ERA REFORMASI

Aip Syarifudin

Dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jl.Tuparev No.70 Cirebon, Telp/Fax: 0231-209806
aip.syarifudin@umc.ac.id

Abstrak

Dalam sejarah perkembangannya, Negara Republik Indonesia tidak luput dari peran serta mahasiswa sebagai salah satu bagian masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan lebih dalam mengawal terselenggaranya pemerintahan. Mahasiswa dengan fungsinya sebagai *agent of change* dan *agent of social control* harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintahan.

Namun ada fenomena yang menarik saat ini, kebanyakan mahasiswa sudah tidak mampu lagi berada pada posisi pemerhati dan pengaplikasi pembangunan masyarakat. Mahasiswa dengan dengan berbagai macam kesibukannya seperti sengaja memposisikan diri atau diposisikan sebagai penonton saja tanpa memberikan masukan dan kritik yang membangun. Situasi semacam ini bukanlah hal yang serta merta terjadi, tentu ada upaya yang mengarahkan agar mahasiswa tidak terlalu kritis dalam menyikapi roda pemerintahan. Secara internal kemahasiswaan itu sendiri saat ini mahasiswa terlalu banyak disibukan dengan aktifitas lain yang tidak menopang pengembangan dirinya sebagai mahasiswa yang produktif, sehingga disebutlah sebagai **silent majority** serta tidak mampu menjadi **pressure group**.

Keyword : Silent Majority, Pressure Group

Pendahuluan

Kemerosotan negara-negara Afrika dalam pembangunan menjadi perhatian World Bank yang membuahkan laporan berjudul "*Sub Saharan Africa: From Crisis To Sustainable Growth*" Tahun 1989. Analisis World Bank saat itu menunjukkan bahwa penyebab terpuruknya negara-negara Afrika disebabkan karena menguatnya hegemoni kekuatan politik domestik dengan kata lain kekuatan negara. Hal ini mendorong World Bank merekomendasikan gagasan untuk melibatkan sektor lain dalam proses pembangunan yakni sektor *Privat* guna memajukan ekonomi, sektor *Civil Society* dimaksudkan untuk mengontrol kekuatan Negara serta untuk melimitasi keterlibatan negara (Abrahamson 2000 dalam Masudi, JSP).

Disisi lain, pemerintahan sebagai kajian ilmiah pun mengalami perkembangan. Sebelumnya kajian tersebut hanya memfokuskan pada *State* (Negara) untuk melihat fenomena pemerintahan. Kemudian pada tahun 1990an muncul paradigma *Governance*. Secara keilmuan pun beralih dari paradigma *Government to Governance* yakni pembahasan pemerintahan dengan melihat tiga aras sektor yakni *State, Privat, dan Civil Society* (Pierre dan Peters dalam Cornelis Lay dan Wawan Masudi, JSP), sehingga dianggap membantu dalam meneropong masalah-masalah Negara karena pembahasannya menyeluruh dari tiga sektor.

Dari fakta hasil analisis World Bank 1989 dan pergeseran kajian pemerintahan secara ilmiah dari *Government* menjadi *Governance* di tahun 1990an, maka

bisa ditarik benang merah dalam fokus tulisan ini adalah menguatnya kekuatan masyarakat (*civil society*). Hal ini juga dipengaruhi oleh paham demokrasi yang telah tersebar di pelbagai belahan dunia.

Begitupun di Indonesia, konsesus pemakaian demokrasi sebagai paham bernegara hadir di tahun 1998 pasca peristiwa bersejarah reformasi, dimana kekuatan Mahasiswa dan rakyat (*people power*) menyeru turunnya aktor pemegang rezim pada saat itu. Dalam fenomena ini kekuatan *Civil Society* menguat bukan hanya untuk melimitasi kekuasaan Negara tapi bahkan untuk menggergaji rezim.

Pressure Group pada Negara

Tulisan ini akan mengelaborasi satu dari tiga sector *Governance* yaitu *Civil Society* dalam kaitannya dengan pembangunan Negara. Terlebih di Indonesia yang menganut paham demokrasi, kekuatan masyarakat memiliki peran sentral guna mengimbangi maupun menjalankan fungsi *check and balances system*.

Adapun objek yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mahasiswa. Namun sebelum membahas objek tersebut, penulis akan menekankan bahwa di level *Civil Society* terjadi pengorganisasian kelompok. Di sinilah terkadang timbul kekeliruan, asumsi umum lebih mengatakan setiap organisasi di level masyarakat sudah pasti *Civil Society Organization (CSO)*, padahal secara bangunan teoritis tidaklah demikian.

Mahasiswa sebagai objek telaah dalam tulisan ini bukan merupakan CSO, karena statusnya agen perubahan atau *agent of change*, mahasiswa dan fungsinya lebih tepat menyandang sebagai kekuatan

kelompok penekan Negara (*Pressure Group*). Meskipun demikian tentulah *pressure group* adalah salah satu entitas yang berada di level masyarakat (*Civil Society*).

Setiap pemerhati politik faham betul betapa pentingnya kekuatan di level *Civil Society*. Terlebih negara kita sendiri yang telah memuntahkan rezim otoritarian dan menelan rezim demokrasi kini, maka pertanyaannya adalah seberapa besarkah peran entitas *Civil Society*? Tentunya jika mahasiswa telah disebutkan sebagai entitas yang berada di level *Civil Society* yakni sebagai kelompok penekan (*Pressure Group*), maka seberapa pengaruhkah mahasiswa bagi negara?

Dalam menjawab hal tersebut, penulis menggunakan sudut pandang Negara sebagai dasar acuan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori tentang Negara yang di dalamnya mencakup penjelasan tentang posisi dan keharusan entitas *Civil Society* khususnya dalam interaksinya dengan negara.

Hingga saat ini, terdapat tiga teori tentang Negara, pertama yaitu teori Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu. Teori kedua yaitu teori Sistem Politik dari David Easton, dan yang ketiga adalah Teori Bola Lampu dari Gabriel A. Almond. Sedangkan pembahasan topic dalam tulisan ini penulis menggunakan kacamata teori Sistem Politik David Easton. Hal ini dikarenakan dalam teori Sistem Politik Easton, *Civil Society* mendapat porsi pembahasan yang cukup dan didalamnya juga terdapat pembahasan tentang interaksi level *Civil Society* dalam proses politik.

Easton memaparkan bahwa (sistem politik) berjalan dengan mekanisme input politik, proses

politik, output politik dan feedback¹⁰. Adapun input politik tersebut adalah interaksi dari *civil society* (masyarakat) pada negara. **Input politik** sendiri bisa berupa tuntutan (*demand*) ataupun berbentuk dukungan (*support*).

Setelah masuk dari input politik tersebut (*support or demand*) maka akan berlanjut pada tahap **proses politik**. Disinilah wilayahnya lembaga-lembaga memproses aspirasi dari masyarakat. Kemudian tahap berikutnya adalah **output politik** yakni hasil dari proses politik tersebut yang berupa keputusan maupun tindakan. Proses inilah yang berdampak langsung pada masyarakat sehingga menimbulkan **feedback** atau umpan balik dan mempengaruhi bagian awal dari skema sistem politik yaitu **input**.

Sejarah Pergerakan Mahasiswa sebagai *Pressure Group*

Dari skema sistem politik ala Easton tersebut, terlihat bahwa entitas yang berada di level *Civil Society* termasuk kelompok *Pressure Group*. *Pressure Group* tersebut memiliki andil dalam memberikan masukan yang dihasilkan dari reaksi yang dirasakan masyarakat akibat keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa kebijakan publik. Kemudian mereka akan menentukan sikap mereka, apakah mendukung (*support*) atau memberikan tuntutan (*demand*).

Lantas bagaimanakah dengan kontribusi mahasiswa sebagai *Pressure Group*? Sebelum mengulas kontribusi mahasiswa pada Negara, maka diperlukan pemahaman historis mengenai pergerakan mahasiswa yang telah mempengaruhi sistem politik Indonesia di era sebelum reformasi.

Dalam tinjauan sejarah Indonesia, mahasiswa tercatat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Menurut Adi Suryadi Culla¹¹ sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia, bahkan karena peran kesejarahannya tersebut mahasiswa diperibahasakan sebagai generasi patah tumbuh hilang berganti, tentunya kita tidak akan lupa bagaimana peranan Budi Utomo- sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah STOVIA memelopori perjuangan merebut kemerdekaan melalui jalur organisasi pada tahun 1908, kepeloporannya ini dicatat sebagai pionir serta menjadi titik awal pergantian strategi perjuangan kemerdekaan, dari bentuk tradisional perlawanan fisik beralih ke bentuk pergerakan organisasi modern.

Pada tahun 1920-an, para pemuda kembali mengukir sejarah. Para pemuda yang tersebar dalam berbagai organisasi kedaerahan kemudian bersatu dalam tekad yang tertuang dalam ikrar sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut menyatukan seluruh pemuda lewat satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

¹⁰Novi hendra dalam Whisnu Sentosa Makalah "HMI Berinsan Cita Bukan Pencari Kuasa : Suatu Studi Pada input Politik Status dan Fungsional HMI". Makalah pernah disajikan dalam lomba LKTI Badko HMI Jawa Barat bulan Maret 2014

¹¹ Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999). Hal 18-32

Selanjutnya, pada peristiwa deklarasi kemerdekaan pada Agustus 1945. Diraihnya kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran para pemuda dan mahasiswa yang mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta untuk menyegerakan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari tentara sekutu.

Peranan pemuda dan mahasiswa pasca kemerdekaan terus berlanjut. Salah satu peran sosial politik yang menonjol pasca kemerdekaan adalah saat lahirnya gerakan mahasiswa di tahun 1966. Menurut Khatimi Bahri¹² gerakan mahasiswa 1966 dianggap sebagai agen perubahan sosial dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Ia dianggap mampu mengartikulasi secara tepat apa yang menjadi kegelisahan dan tuntutan rakyat ketika itu, melalui Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) mahasiswa mendapat dukungan luas masyarakat untuk menggerakkan perubahan yang berujung dengan kejatuhan penguasa Orde Lama.

Masuknya era Orde Baru tidak terlepas dari peran generasi mahasiswa 1966 yang didukung oleh Militer dalam setiap aksinya. Menurut Eep Saefulloh Fattah¹³ konsolidasi awal pemerintahan Orde Baru menjadi masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa, dalam masa tersebut tumbuh harapan besar ditengah mahasiswa bahwa penguasa baru ini akan bersikap akomodatif dan responsif

dibandingkan penguasa sebelumnya (Orde Lama). Tetapi masa bulan madu itu kemudian dengan cepat berubah memasuki tahun 1970-an, terutama semenjak tahun 1971. Pada masa itu, mulai bertumbuhan komunitas-komunitas kritis ditengah mahasiswa, sehingga mengakibatkan mulai terbentuk jarak antara kepentingan perubahan yang dicita-citakan mahasiswa dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara dalam meletakkan dasar-dasar modernisasi pembangunan secara cepat.

Selanjutnya timbul rasa kecewa dari dalam diri mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru. Mahasiswa kemudian menggelar berbagai aksi demonstrasi di berbagai kampus sebagai bentuk kekecewaan. Puncaknya terjadi pada 15 Januari 1974 yang dimotori oleh Dewan Mahasiswa (DM) UI, ketika kedatangan Perdana Menteri (PM) Tanaka, mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran yang berujung aksi huruhara yang membakar kota Jakarta. Perlawanan mahasiswa mencapai puncaknya pada peristiwa malari. Adapun aksi mahasiswa tersebut memiliki tujuan untuk memperingatkan pemerintah terhadap efek dari kebijakan pembangunan yang diambil kepada masyarakat.

Rezim Orde baru menamakan diri sebagai rezim demokrasi pancasila. Namun nyatanya Orde Baru yang diharapkan menjadi angin segar selepas keluar dari Orde lama berubah bak menjadi Monster. Rezim pada saat itu mengeras, menjadi refresif. Disaat yang sama keluarlah ketentuan yuridis yang sangat berpengaruh pada kehidupan gerakan mahasiswa yakni kebijakan NKK-BKK.

¹² Khatimi Bahri, *Fase-Fase Gerakan Mahasiswa dalam Fahrul Zaman Fadhy (editor), Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998*. (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999). Hal 56

¹³ Eep Saefulloh Fattah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrotan Orde Baru : Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010). Hal 116-117.

Pada akhir episodenya, rezim Orde baru pun tumbang oleh kekuatan kelompok mahasiswa. Mahasiswa menuntut kebebasan yang dipasung selama perjalanan pemerintahan Orde baru. 1988 adalah menjadi tahun puncak berhentinya rezim ini sekaligus menjadi sejarah gerakan mahasiswa terbesar saat ini.

The Silent Majority

Nur Aida Mardhalita (2012) menyebutkan bahwa ada kesamaan antara gerakan mahasiswa kontemporer di era demokrasi dengan gerakan Mahasiswa tahun 80an. Secara menyeluruh dua gerakan di zaman yang berbeda ini beresensikan "*Silent Majority*". Bagi Mardhalita jika pada Orde baru menjadi gerakan yang terdiam lantaran kebijakan negara seperti NKK-BKK, namun pada era kontemporer justru gerakan mahasiswa terdiam karena kebebasan itu sendiri.

Perlu disadari era demokrasi tentulah sangat erat dengan hawa kebebasan. Disaat yang sama bisa mengundang hadirnya ideologi parsial seperti individualisme, konsumerisme, hedonisme dan lain-lain. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada kondisi gaya kehidupan mahasiswa, khususnya berpengaruh pada gerakan mahasiswa. Kerana disaat itu pula tidak akan pernah terjadi integrasi gerakan seperti menyatunya mahasiswa di tahun 1966, ataupun bertemunya mahasiswa dan menjadikan rezim sebagai *Common Enemy* di tahun 1998. Gerakan hari ini lebih cenderung bersifat parsial, kerana berjalan masing-masing.

Berdasarkan asumsi Mardhalita, gerakan *silent majority* dilihat dengan dua variabel. *Pertama*, menjamurnya ideologi parsial hedonisme, konsumerisme, materialisme, individualisme sebagai

efek negatif dari kebebasan itu sendiri. *Kedua*, munculnya wajah gerakan yang parsial atau terpecah, tidak terintegrasikan.

Gerakan *silent majority* saat ini memang sangat terlihat di era reformasi dimana demokrasi kini sedang dijunjung. Mahasiswa pada umumnya kini tidak melakukan peranannya seperti dalam skema sistem politik David Easton sebagai *Pressure Group*. Hal ini terlihat dari realitas dua variable yang cukup merasuk kedalam pergerakan mahasiswa. Pada variabel pertama misalnya, menjamurnya ideologi hedonisme, individualisme dan sebagainya itu menjadi nyata ada pada mahasiswa jaman sekarang. Ini menjadi tanda sekaligus memudarnya tradisi religiusitas dalam kultur berorganisasi di kalangan mahasiswa.

Pada variabel kedua, terjadi gerakan yang parsial. Tentulah kita telah mencerna semua, bahwa mahasiswa terlalu disibukkan oleh kegiatan politik internal organisasi. Saling rebut kekuasaan, akhirnya terjadi faksionalisasi (gerbong) kader. Disaat itu pula lah gerakan mahasiswa menjadi gerakan yang terdiam (*silent majority*). Karena gerakan mahasiswa tidak terkonsolidasikan lantaran terus sibuk dengan fluktuasi konflik politik internal organisasi sendiri.

Epilog : Hidupkan Mahasiswa, Selamatkan Indonesia

Masukan yang baik akan menjadi keluaran yang baik. Pun begitulah dalam alur bernegara. Jika Easton dalam paparan sebelumnya menyebutkan bahwa dalam suatu negara terjadi pola alur input politik, proses politik, output politik dan feedback. Maka akan juga terjadi logika, masukan yang baik pada negara akan menjadi keluaran yang baik pada Negara. Input politik yang

baik maka akan menjadi kebijakan publik yang baik.

Jika kita sudah mensadari bahwa mahasiswa adalah entitas *pressure group* yang berada di level *Civil Society*. Dalam hal ini secara fungsi berinteraksi pada negara dan memberikan masukan pada negara, maka logika umum pun berlaku. Jangan-jangan krisis kebijakan publik negara yang populis adalah karena krisis pula pada input politik dari *Civil Society*.

Maka dari situlah logika mahasiswa harus berbicara. Menjaga Indonesia maka harus lebih dulu menjaga mahasiswa. Jika mahasiswa terjaga maka input politik yang di masukan pada proses politik negara akan mengeluarkan kebijakan publik yang populis. Disisi yang lain mahasiswa yang menelorkan aktor-aktor hasil didikannya akan menjadi *leader* yang baik bagi negara karena terdidik dengan baik saat menjadi mahasiswa.

Dengan demikian, bagi penulis dalam menjawab fenomena mahasiswa ini sebagai solusinya sangatlah sederhana. *Pertama*, kembali pada kaderisasi mahasiswa berkualitas secara intelektual dan kritis secara faktual. Dalam konteks ini dunia Kemahasiswaan harus ditempatkan sebagai ruang kaderisasi. Baik secara akademik profesional maupun secara mental organisasi.

Kedua, memilah dan memilih isu strategis. Hal yang dipandang masalah publik dan mendasar sangatlah relevan mahasiswa kaji. Dengan demikian hasil analisis mahasiswa akan menjadi manfaat bagi masyarakat umum. Masih banyak sekali isu umum yang perlu di kaji oleh organisasi mahasiswa yang notabene akan memberikan input politik pada Negara.

Kemudian salah satu hal yang sangat *urgent* dan membutuhkan pengawasan mahasiswa dalam mewujudkan *good goverment* adalah terselenggaranya pemilu yang bersih, mewarisi azas *luber*. Maka kemudian kontribusi mahasiswa dalam mengawal terselenggaranya hajat politik di Indonesia yang bersih dan bermartabat adalah dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Sebagai agen informasi independen dan objektif.

Mahasiswa yang secara peran dan fungsi selain kaum intelektual mahasiswa juga selama ini berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pemikiran pemikiran ilmiah yang kritis terhadap pambangunan daerah dimana peran *social control* mahasiswa yang terbiasa mengkritisi kebijakan kebijakan daerah dengan temuan temuan objektifitas penelitiannya selama penyelenggaraan periode pemerintah sebelumnya, tentu menjadi sumber catatan kritis dan informasi kepada khalayak masyarakat umum. Catatan Penyelenggaraan tersebut dapat disebarakan secara independen dan objektif kepada khalayak umum sehingga informasi tersebut menjadi sebuah dasar pengetahuan dan pertimbangan dalam memilih pemimpin di periode berikutnya apakah akan mampu mencapai visi misinya atau tidak.

2. Mahasiswa sebagai agen perubahan paradigma dari politik *praktis* ke politik *idealis*

Independensi dan idealisme mahasiswa tidak diragukan lagi, dalam hal ini mahasiswa memiliki ciri bahwa pemikiran kritisnya menjadi tameng idealismenya untuk melaksanakan hal hal yang transaksional. Pemikiran dan langkah tersebut dapat ditularkan

kepada masyarakat luas bahwa dalam memilih pemimpin kepala daerah harus sesuai dengan pemikiran objektifitas masyarakat itu sendiri bukan atas dasar transaksional.

3. Menjadi pemilih cerdas yang visioner

Dalam kontestasi politik, mahasiswa yang cerdas bisa memanfaatkan momentum pemilu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya baik kualitas pribadinya maupun kualitas organisasi kemahasiswaan yang diikutinya.

Dalam prosesi pemilihan kepala daerah biasanya mahasiswa dan organ kemahasiswaan menjadi sangat seksi, menjadi rebutan para calon kepala daerah. Disamping memiliki masa, organ kemahasiswaan juga dianggap memiliki konsepsi pemikiran dan rekomendasi program kearah perubahan yang lebih baik.

Dari proses pencermatan tersebut mahasiswa harus menjadi pemilih cerdas yang visioner yaitu cerdas memilih pemimpin yang benar benar berkomitmen kepada pembangunan daerahnya yang lebih baik lagi.

4. Menjadi partner penyelenggara pemilu baik pelaksana pemungutan suara maupun pengawas pemilihan umum

Mahasiswa yang sejatinya adalah sebagai agen social control tidak terlepas juga sebagai control demokrasi penyelenggaraan pilukada, dengan kapasitas dan jaringan yang luas mahasiswa dapat mengakses informasi dengan mudah penyelenggaraan pemilu dan segala macam informasi yang berkaitan dengan itu. Mahasiswa dengan kecerdasan sosialnya harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat inilah masa

yang pas untuk merubah daerah sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain sebagai informan penyelenggaraan pilukada, mahasiswa juga harus menjadi partner pengawas penyelenggara juga, menjadi mahasiswa kritis dan solutif sangat diharapkan bisa membantu penyelenggaraan pilukada yang benar benar demokratis dan meminimalisir atau bahkan bisa membantu merealisasikan pemilu yang bersih tanpa kecurangan pemilu.

Kesimpulan

Dalam rangka berbangsa dan bernegara, mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal segala bentuk proses pemerintahan. Pengawasan ini dimulai dari arena pemilihan umum baik pilukada ataupun pemilu legislatif. Banyak tugas dan peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan kapasitasnya yang luar biasa.

Mahasiswa dianggap mampu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang cerdas sekaligus pemerhati pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat yang cerdas dan melek politik akan mampu melahirkan para *petarung* politik sehingga tidak salah dalam menentukan arah kebijakan. Kemudian masyarakat yang cerdas dan melek politi pun akan mampu menjadi mitra pemerintah sekaligus menjadi pengingat ketika pemerintah sudah mulai keluar dari track *good govermet*.

Mahasiswa dalam kesehariannya harus bisa bergerak secara masif dan interaktif, tidak malah menjadi bagian masyarakat yang hanya mampu diam tanpa memberikan masukan apapun kepada pemerintah. *Silent Majority* adalah merupakan kemunduran yang luar biasa, karena sejatinya mahasiswa

harus mampu bergerak secara cerdas dan sustainable dalam mengawal kebijakan dari pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat dapat menikmati pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Whisnu Sentosa Makalah “HMI Berinsan Cita Bukan Pencari Kuasa : Suatu Studi Pada input Politik Status dan Fungsional Organisasi”. Makalah pernah disajikan dalam lomba LKTI Badko HMI Jawa Barat bulan Maret 2014

Referensi

- Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Eep Saefulloh Fattah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru : Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta : Burung Merak Press, 2010).
- Esai Nur Aida mardhalita berjudul “Intergasi Silent Majority: Modal Gerakan Mahasiswa Era Demokrasi” dalam buku berjudul Gerakan Mahasiswa antara Mimpi Idealitas dan Pragmatisme, KOMAP, 2012
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Cornelis Lay dan Wawan masudi, *Perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan* , Volemo 09 nomor 02 2005
- Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik : Muhadi Sugiono, Global Governance sebagai agenda penelitian studi hubungan internasional, Volume 8 nomor 2 tahun 2004
- Khatimi Bahri, *Fase-Fase Gerakan Mahasiswa dalam Fahrur Zaman Fadhly (editor), Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998*. (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999)